BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlakuan perhitungan Nilai Kualitas Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga dilaksanakan berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 terkait kalkulasi juga evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja juga anggaran kementerian negara/lembaga. Kalkulasi mutu belanja negara ditampilkan pada indikator kinerja utama indeks kualitas belanja negara dengan menunjukkan indeks dari mutu belanja negara dengan esensi kalkulasi untuk jenjang efektivitas, efisiensi juga outcome berdasar belanja negara untuk Direktorat Jenderal Anggaran, mutu belanja negara yang disajikan dengan Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang mana tercantum pada aplikasi SMART.² Aplikasi SMART merupakan aplikasi berupa web yang bertujuan untuk meringankan pekerjaan untuk memantau juga melakukan evaluasi pengerjaan anggaran.³

Direktorat Jenderal Anggaran telah berupaya untuk memperbaiki dalam pencapaian nilai Indikator Kinerja Utama yang optimal, khususnya dengan melajukan pendidikan juga interaksi bersama Kementerian/Lembaga antara lain sokongan juga konsultasi dari

² Kementerian Keuangan, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Anggaran 2021*, dalam <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/8a1718d2-8354-4b3f-a82f-5a28a2f95c96>, hlm. 32

³ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran, “*Aplikasi SMART*” dalam <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/aplikasi-smart>, diakses 14 Maret 2024

problematika yang ada di K/L terhubung dengan Evaluasi Kinerja Anggaran, memantau juga evaluasi kinerja anggaran K/L Triwulan juga pengawasan atau bantuan teknis pada K/L untuk usaha dalam mencapai maksimum. Dalam rangka memaksimalkan pencapaian IKU tahun 2021 Direktorat Jenderal Anggaran telah melaksanakan beberapa tindakan, salah satunya adalah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PPMK.02/2021 terkait kalkulasi juga evaluasi kinerja anggaran untuk pengerjaan rencana kerja juga anggaran kementerian negara/lembaga pada 15 Maret 2021 untuk bentuk penyempurnaan dari aturan sebelumnya juga menyelaraskan pada redesain system perencanaan juga penganggaran.⁴

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 22/PMK.02/2021 mengatur terkait kalkulasi juga evaluasi anggaran atas pelaksanaan rencana kerja juga anggaran kementerian negara/lembaga atas dasar pengaplikasian ialah proses guna menyediakan referensi kinerja tentang kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya untuk sebagian instrument anggaran guna pengerjaan fungsi akuntabilitas juga pengoptimalan mutu.

Fungsi akuntabilitas berorientasi menguji juga beramanah dengan kompeten pada pihak yang berkepentingan atas pengguna anggaran yang dijalankan kementrian/lembaga bersangkutan bagi kepentingan masyarakat. Sementara, fungsi peningkatan kualitas berorientasi mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyokong dan penghambat dari pengerjaan

⁴ Kementerian Keuangan, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Anggaran...*, hlm 35

rencana kerja juga anggaran kementerian negara/lembaga untuk usaha pengoptimalan kinerja anggaran dan sebagai masukan di tahun-tahun berikutnya.⁵

Sebagai alat utama untuk mensejahterakan masyarakat tentunya Anggaran Pendapatan Belanja Negara menjadi peran yang esensial baik melalui pelaksanaan wewenang, perancangan, pemantauan, distribusi, alokasi, juga kesetimbangan.

Tugas wewenang memiliki makna anggaran negara adalah landasan dalam pelaksanaan perolehan juga belanja untuk tahun yang berjalan. Tugas perancangan memiliki makna jika anggaran negara digunakan manajemen sebagai acuan pada perencanaan suatu aktivitasn untuk tahun yang berjalan. Tugas pemantauan memiliki makna anggaran negara digunakan sebagai landasan dalam melakukan penilaian terhadap kegiatan pelaksanaan pemerintah negara. Fungsi alokasi memiliki makna anggaran negara dapat terkonsentrasi menurunkan angka tunakarya juga penghamburan sumber daya, dan mengoptimalkan efisiennya serta efektivitasnya ekonomi. Tugas distribusi memiliki makna jika regulasi anggaran mengandung kesetaraan dan kesesuaian. Fungsi stabilisasi memiliki makna anggaran pemerintah sebagai sarana pemeliharaan dan pengupayaan kestabilan esensial perekonomian.⁶

⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*

Pembelian infrastruktur yang bersinggungan langsung pada keperluan khalayak ramai dapat menstimulus perekonomian merupakan peran dari belanja pemerintah dengan asumsi untuk aktivitas efektif. Pembangunan fasilitas juga dapat meningkatkan perkembangan keadaan perekonomian, disebabkan pembangunan fasilitas dapat menggalakkan investasi, dengan investasi tersebut dapat menghasilkan lowongan kerja baru juga mengambil lebih banyak pekerja.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 17/2003 pasal 3 terkait Keuangan Negara jika keuangan negara perlu dijalankan dengan teratur, mengikuti aturan perundangan, mangkus, sederhana, terbuka, juga bertanggungjawab dengan mengamati keadilan juga kepatuhan.⁷ Fungsi perbendaharaan memiliki peran esensial pada bentuk manajemen sumber keuangan pemerintah yang tercatat dalam UU 1/2004 terkait bendahara negara.⁸ Pemeriksaan kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah inspeksi pengaturan uang negara yang tersusun dari inspeksi ekonomi juga mangkus serta aspek efektivitas sebagaimana yang tercantum pada pasal 4 UU 15/2004 terkait Pemeriksaan Pengantuan Jugatanggung Jaawab Keuangan Negara.⁹

Selama tahun 2021 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar telah menjalankan berbagai aktivitas dan program selayaknya tertera pada peta taktik KPPN Blitar tahun 2021 yang dijelaskan pada kontrak kinerja

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003...*

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara*

Kepala KPPN Blitar Tahun 2021 yang terdiri dari Sembilan sasaran startegis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan kalkulasi kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Blitar sudah meraih 108,02. Nilai itu dihasilkan dari peraian kinerja untuk tiap perspektif yakni stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, juga Learning and growth perspective. Prestasi tujuan ini adalah pencerminan pada kontribusi untuk stakeholders dalam pengelolaan APBN hingga tahun 2021.¹⁰

Dalam menciptakan kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar dalam tahun anggaran 2021 memperoleh alokasi pagu dana awal sebesar Rp1.436.265.000,- yang ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2021. Kantor layanan perbendaharaan negara Blitar telah merealisasikan 98,95 persen dari total pagu dana yang tersedia, yakni sebesar Rp1.421.230.916,.¹¹ Rincian pagu dan realisasi belanja per jenis belanja tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2021

PERIODE		JENIS BELANJA		
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Beelanja Modal
Tahun 2021	PAGU	238.464.000	1.181.801.000	16.000.000
	REALISASI	236.443.000	1.169.057.916	15.730.000

¹⁰ *Laporan Kinerja KPPN Blitar Tahun 2021*, hlm 1

¹¹ *Ibid.*, hlm 54

Sebagai penggerak pelayanan publik yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah, KPPN Blitar mengisi tempat utama cukup baik dengan alasan menjadi satu-satunya wakil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Kota Blitar, Kabupaten Blitar dan Tulungagung yang menopang tugas menerima, membagikan juga menjaga Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara di tempat kerjanya, ialah penggerak layanan Direktorat Jenderal bendahara pada rakyat di wilayahnya, sebab itu mutu dari layanan yang dibagikan akan mempengaruhi citra di direktorat jenderal perbendaharaan.¹²

Sebagai satuan kerja yang dijadikan percontohan untuk satuan kerja di tempat pembayaran sudah semestinya perlakuan anggaran untuk KPPN Blitar dilaksanakan dengan mangkus. Pengerjaan anggaran yang ditujukan merupakan pengerjaan belanja negara yang dilalui dari kegiatan rancangan anggaran, pengerjaan, penata usaha, juga kegiatan pemantauan serta penilaian. Efisien belanja pada KPPN Blitar artinya realisasi belanja perlu selaras dengan target tetapi dkerjakan dengan aspek efisien (pemakaian sumber daya maksimal gunamendapatkan hasil yang optimal). Apabila KPPN Blitar belum melaksanakan anggarannya secara efisien KPPN Blitar tidak dapat menyampaikan bimbingan teknis yang akurat dan sesuai untuk satuan kerja pada lingkup wilayah pembayarannya. Dengan demikian pengerjaan anggaran di kota Blitar cukup tidak efisien. Lebih lanjut, berpengaruh pada tingkat efisiensi dalam skala nasional.

¹² *Laporan Kinerja KPPN Blitar Tahun 2021...*, hlm. 9

Pengukuran dan penilaian terhadap efisiensi pengerjaan anggaran yang dikerjakan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian keuangan belum seluruhnya membagikan feedback untuk KPPN Blitar sebagai satuan kerja terevaluasi. KPPN Blitar untuk unit kantor vertical Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ada di bawah juga tanggung jawab terbuka pada kepala kantor wilayah direktorat perbendaharaan provinsi Jawa Timur, dengan daerah kerja Kabupaten Blitar, Kota Blitar juga Kabupaten Tulungagung.

Di era globalisasi dan banyaknya tuntutan reformasi yang semakin meningkat, akuntansi memiliki peran yang penting sebagai alat pencatatan. Selain diperuntukan kepada pihak manajemen suatu entitas, pencatatan juga digunakan sebagai kebutuhan pertanggungjawaban kepada seluruh pihak yang bersangkutan. Akuntansi pemerintahan menjadi tugas esensial untuk mengoptimalkan persepsi rakyat maka dari itu perlunya keterbukaan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik, yang mana adanya tanggungan dalam menyiapkan, memberi juga memunculkan informasi.¹³

Meningkatkan kinerja anggaran perlu dilakukannya evaluasi kinerja anggaran, dimana hal tersebut dapat dipakai layaknya sebagian landasan guna perancangan target, arahan kebijakan juga keutamaan pembangunan, perancangan rewi angka dasar, penyusunan pembagian anggaran tahun

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*

selanjutnya atau keselarasan tahun berkenaan serta pembagian penghargaan juga pemakaian sanksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kakerissa, Warongan, dan Christian V. Datu untuk mengidentifikasi penilaian kinerja anggaran atas aspek pemaparan untuk Badan Pusat Statistik Kab. Maluku Tenggara bahwa evaluasi kinerja anggaran telah dikerjakan selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 yang dinilai dari langkah penyediaan, penghimpunan data, kalkulasi juga evaluasi, telaah, rancangan rekomendasi juga laporan tetapi belum optimal untuk langkah telaah.¹⁴

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Priatno menunjukkan jika sudah muncul inefektifitas untuk pendapatan anggaran satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Blitar sebab kinerja perancangan pada satuan kerja yang masih tergolong buruk. Pada penelitian ini faktor administrasi juga SDM memiliki dampak yang tidak signifikan pada serapan anggaran satuan kerja sementara aspek rancangan juga aspek penyediaan barang juga jasa memiliki dampak yang signifikan pada serapan anggaran satuan kerja.¹⁵

Sehubungan dengan riset yang dilakukan oleh Utomo, riset yang dikerjakan oleh Utomo menyatakan jika KPPN Malang pada tahun 2015 mencapai nilai kinerja anggaran “Sangat Baik”, jenjang efektivitas

¹⁴ Herdian Kakerissa, Jessy D.L. Warongan, Christian V. Datu, “Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara”, dalam

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/search/authors/view?givenName=Herdian&familyName=Kakerissa&affiliation=Universitas%20Sam%20Ratulangi%20Manado&country=ID&authorName=Kakerissa%20%20Herdian>, diakses 2 Desember 2023

¹⁵ Prasetyo Adi Priatno, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar” dalam <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/603/546>, diakses 20 September 2023

pengerjaan anggaran “Sangat Baik”, dan jenjang mangkus pengerjaan anggaran “Kurang”. Pada tahun 2016 KPPN Malang mencapai kategori “Sangat baik”, sementara tahun 2017 termasuk “Baik”.¹⁶

Beberapa riset tersebut mempunyai keselarasan dengan riset yang akan dikerjakan oleh peneliti. Pemaparan dari riset terdahulu untuk mengidentifikasi kesesuaian evaluasi kinerja anggaran berdasarkan PMK 22/PMK.02/2021 yang dimulai dari langkah penyediaan hingga pelaporan. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah KPPN Blitar telah melaksanakan evaluasi kinerja anggaran berdasarkan PMK 22/PMK.02/2021 yang dimulai dari langkah penyediaan hingga pelaporan. Sehingga dapat membuktikan bahwa KPPN Blitar merupakan satuan kerja yang memiliki kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa muncul inefektivitas untuk pendapatan anggaran satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Blitar sebab kinerja rancangan pada satuan kerja masih tergolong buruk. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni objek KPPN Blitar sebagai satuan kerja namun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menganalisis dan mengidentifikasi tingkat penyerapan anggaran. Pencapaian tingkat penyerapan anggaran yang

¹⁶ Daryoto Muslih Utomo, “*Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 (Studi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang Periode 2015 – 2017)*”, dalam <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5472/4810>, diakses 24 Maret 2024

optimal sangat penting karena sebagai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkualitas.¹⁷

Adanya perbedaan antara riset ini dengan riset terdahulu, yakni dasar perhitungan yang digunakan untuk pengukuran juga penilaian pelaksanaan anggaran atas aspek implementasi, penelitian sebelumnya menggunakan PMK 249 tahun 2011 sementara riset yang akan dikerjakan oleh peneliti ialah PMK 22 tahun 2021. Perubahan dasar perhitungan ini disebabkan oleh ditetapkannya PMK tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana rencana kerja dan anggaran K/L.terkait kalkulasi juga penilaian kinerja anggaran atas pengerjaan rancangan kerja juga anggaran K/L.

Perbaikan atas PMK tentang penilaian kinerja anggaran guna menyelaraskan dengan ketetapan untuk Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) memungkinkan banyak satker juga K/L yang belum seluruhnya mendalami aturan yang baru, sehingga diperlukan penelitian mengenai evaluasi kinerja anggaran untuk kantor layanan perbendaharaan negara Blitar berdasarkan aturan menteri keuangan No. 22 Tahun 2021 terkait kalkulasi juga penilaian kinerja dari pengerjaan rancang kerja juga anggaran kementerian negara/lembaga riset ini dinantikan dapat memperoleh ilustrasi yang jelas untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan

¹⁷ Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, “Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) sebagai Alat Kontrol dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Kinerja Keuangan Satuan Kerja”, dalam <https://ditjenpktn.kemendag.go.id/berita/indikator-kinerja-pelaksana-anggaran-ikpa-sebagai-alat-kontrol-dalam-melakukan-pengawasan-pengelolaan-kinerja-keuangan-satuan-kerja>, diakses 26 Juni 2024

Negara Blitar terkait kesesuaiannya terhadap pengerjaan penilaian kinerja anggaran dan kinerja pelaksanaan anggaran atas aspek penerapan.

B. Fokus Penelitian

Berlandaskan pemaparan pada konteks penelitian, dapat ditarik fokus penelitian pada riset ini adalah seperti berikut:

1. Bagaimana Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar melakukan evaluasi kinerja anggaran?
2. Bagaimana pelaksanaan anggaran atas Aspek Implementasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021?
3. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 atas Aspek Implementasi?
4. Bagaimana nilai evaluasi kinerja anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 atas Aspek Implementasi?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan fokus penelitian, adapun tujuan yang ingin diraih pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar dalam melakukan evaluasi kinerja anggaran

2. Menganalisis dan mengidentifikasi tingkat implementasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021.
3. Mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 atas Aspek Implementasi.
4. Menganalisis dan mengidentifikasi nilai evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 atas Aspek Implementasi.

D. Batasan Masalah

Memperoleh telaah yang komprehensif maka data keuangan yang dipakai ialah data keuangan KPPN Blitar di tahun 2021 hingga sampai 2023. Sebab digunakannya periode waktu tersebut adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 yang mencabut aturan menteri keuangan no. 214 tahun 2017 terkait kalkulasi juga penilaian kinerja atas pengerjaan rencana kerja juga anggaran kementerian negara/lembaga. Dalam penelitian ini hanya terfokus pada Kantor layanan perbendaharaan negara blitar selayaknya satuan kerja.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ialah partisipasi riset pada bidang keilmuan yang dialami. Faedah bias berwujud teoritis juga praktis. Layaknya faeda untuk

penulis, lembaga, budaya juga masyarakat.¹⁸ Riset ini dinantikan membagi kegunaan baik teoritis maupun praktis untuk bermacam pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dinantikan bisa menjadi pengetahuan untuk para satuan kerja serta masyarakat, khususnya satuan kerja dalam wilayah bayar KPPN Blitar dan berhubungan langsung dengan pemerintahan yang relevan dengan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk satuan kerja

Penelitian bisa memudahkan satuan kerja guna mengidentifikasi evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi. Dapat dipakai layaknya referensi juga pertimbangan dalam rangka perencanaan yang strategis bagi pihak manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja.

b. Untuk perguruan tinggi

Penelitian ini dinantikan bisa sebagai referensi untuk instansi hingga akan berguna dalam mengoptimalkan ilmu perekonomian khususnya untuk manajemen keuangan sector public, juga analisis laporan keuangan

¹⁸ Ayu Rifka Sitoesmi, “*Mengenal Manfaat Penelitian, Pengertian, Karakteristik, dan Jenis-Jenisnya*”, dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/5308743/mengenal-manfaat-penelitian-pengertian-karakteristik-dan-jenis-jenisnya>, diakses 2 Desember 2023

c. Untuk pihak lain

Penelitian ini dinantikan bisa dipakai untuk referensi tambahan bagi penelitian berikutnya yang memiliki tujuan yang sama. Selain itu, dinantikan penelitian selanjutnya mengenai evaluasi kinerja anggaran di masa yang mendatang akan lebih baik.

F. Definisi Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja ialah sebuah proses yang sistematis saat melakukan penilaian mengenai kemampuan pekerja dengan mencermati antara kinerja sesungguhnya dengan standar yang sudah ditentukan oleh organisasi atau lembaga yang diikuti dengan *feedback*.

b. Evaluasi Kinerja Anggaran

Kegiatan dalam rangka menakar, menelaah juga menilai kinerja tahun anggaran berjalan juga tahun anggaran sebelumnya guna merancang usulan pada rancangan meningkatkan kinerja anggaran.

c. Aspek Implementasi

Aspek implementasi ialah evaluasi kinerja yang dikerjakan saat memperoleh informasi kinerja tentang pengerjaan aktivitas perairan pengeluaran. Indikator yang ditakar pada aspek ini terdiri

peraihan pengeluaran, serapan anggaran, efektivitas, juga kestabilan serapan anggaran pada rancangan..

d. Nilai Kinerja

Nilai kinerja merupakan capaian kerja berbentuk hasil dari sebuah program atau keluaran dari sebuah kegiatan dengan pengukuran juga deskripsi terstruktur.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan skripsi tersusun dari enam bab. Tiap bab mempunyai sub bab yang akan menuliskan pemaparan dengan terstruktur juga rinci supaya mudah dimengerti. Adapun sistematika penulisan skripsi iniialah seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, terkait pengertian dan penjelasan teori yang mendasar terkait fungsi manajemen, organisasi sector public, anggaran pendapatan juga belanja negara, anggaran sector public, esensialnya anggaran sector public, akuntansi, pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran, penelitian terdahulu juga kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN, tersusun pendekatan penelitian juga jenis peneltian, lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, keabsahan data juga langkah penelitian.

¹⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021...*

BAB IV HASIL PENELITIAN, berisi tentang penjabaran dari penjelasan informasi data juga temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN, terkait telaah dengan melaksanakan konfirmasi juga sintesis temuan penelitian dengan teori yang ada. Identifikasi dan analisis perhitungan dan penilaian pelaksanaan anggaran KPPN Blitar berdasarkan PMK 22 tahun 2021, menemukan persamaan dan perbedaan terhadap teori-teori beserta hasil yang diperoleh peneliti.

BAB VI PENUTUP, bagian ini terdapat kesimpulan dan saran, daftar rujukan dan lampiran-lampiran yang berkaitan dan menunjang riset.